

Serapan Anggaran Disdikbud Baru 69 Persen



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 07/11/2025

Samarinda – Jelang akhir tahun, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim masih di angka 69 persen. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim, Armin, bahwa berdasarkan prognosis APBD tahun ini untuk Disdikbud sekitar 90 hingga 91 persen. Dari penyerapan tersebut menurutnya masih didominasi pengerjaan fisik.

“Hampir 69 persen, dan kita optimis. Karena untuk pengerjaan fisik ini sementara masih dalam pengerjaan,” ujar Armin. Dia mengakui keterhambatan ini dikarenakan sebagian penyedia jasa atau kontraktor yang belum minta dibayarkan. Menurutnya bisa jadi kontraktor masih memiliki anggaran lebih, sembari menunggu pengerjaan selesai.

“Untuk penyerapan anggaran di Disdikbud skala prioritasnya memang masih pada penyediaan infrastruktur di sekolah-sekolah,” ucapnya. Selain itu, menurutnya yang menjadi perhatian dalam penyerapan APBD ini juga ada pada sektor pelaksanaan Program Gratispol, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), hingga belanja pegawai.

“Apalagi kalau di Dinas Pendidikan karena banyak pegawainya pasti belanja pegawainya itu juga yang paling banyak,” katanya. Diketahui berdasarkan Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada Penyempurnaan Rancangan Akhir P-RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2025, anggaran untuk Disdikbud Provinsi Kaltim sebesar Rp3,7 triliun. Selain itu, untuk pembiayaan belanja pegawai Disdikbud dalam Rencana Kerja Disdikbud Provinsi Kaltim pada tahun 2025, sebesar Rp1,5 triliun.

Lebih lanjut, Armin mengungkapkan untuk Program Gratispol sendiri khususnya pada program seragam gratis, pihaknya telah mengucurkan anggaran senilai Rp65 miliar. Dia

mengaku untuk penyediaan seragam sendiri tengah berproses dan menunggu penyelesaian pengerjaan.

“Nanti setelah semua (seragam) selesai akan langsung kita bagikan kepada siswa di tingkat SMA/SMK/SLB baik negeri maupun swasta, dan targetnya sebelum akhir tahun sudah diterima oleh para siswa,” terangnya. Dengan masih terlaksana berbagai kegiatan dan program di Dinas Pendidikan, Armin berharap penyerapan anggaran bisa lebih maksimal bahkan mampu mencapai target. “Tetapi walaupun memang masih ada SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), itu karena masih ada sisa lelang pengerjaan yang belum tercapai,” tandasnya. **(su/sn/ip)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Serapan Anggaran Disdikbud Baru 69 Persen, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur bahwa sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
2. Dalam Pasal 155 PP 12/2019 diatur bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. menutup defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - f. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g. mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

3. Dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c PP 12/2019 diatur bahwa perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.